LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL : 02/05/2025
NAMA PERUSAHAAN: PT. Jadi Sukses Dirgantara
TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE :
3. RENEWAL :

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE			
2	FC Form NCAGE			
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Islan SAM (NPWP US) (jika ada)			

CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL

PEMBUATAN KODE NCAGE

NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET
1	INPUT DATA NCAGE	16223	

CATATAN	CREATOR	PARAF/TGL
	M. Haris Suhud	02-05-25

VERIFIKASI DATA NCAGE

NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		* Tak ada
3	ISO (CTR)/ Kode Negara	✓		Formulir P' Minbaan
4	State/ Provinsi			
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX			
10	PCC/ Kota, Kode Pos			
11	POC/ Jalan, Kodepos			
12	No.Telp. (Kantor) (*)			Typo
13	No. Fax.(Kantor)			
14	E-Mail (Kantor) (*)			
15	Website (Kantor)			
16	Type of Org. Entity Code			

CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL
	Erni. P	2/5-25

VALIDASI DATA NCAGE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓		
2	SERTIFIKAT NCAGE			

CATATAN	VALIDATOR	PARAF/TGL

Mengetahui,
Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,

Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP. 520914

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 155 /V/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1622Z

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA

The City Tower Lantai 12 Unit 1N
Jl. MH Thamrin No.81 Menteng
Jakarta Pusat

Kode pos : 10310
Telp : +6202129557270
Telefax : -
Email : -

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI

PT. Jadi Sukses Dirgantara – Foto Kantor

Bagikan
Google

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon	: Willianto
No_Identitas	: 1276050305910001
No. Telp/HP	: +62 021 29557270
E-Mail	: willianto.xu@yahoo.com
Jabatan	: Direktur..

II. Tujuan Penerbitan NCAGE	: untuk pembelian dan penyaluran barang Pengadaan Suku Cadang AWP TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 8 TNI AU Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras Pertahanan TA 2025.
III. Kordinat Kantor (GPS Map)	: -6.199424,106.823527
Kepemilikan Bangunan	: Sewa
Nama Badan Usaha	: PT. JADI SUKSES DIRGANTARA
Nama Jalan	: The City Tower Lantai 12 Unit 1N Jl. MH Thamrin No.81 Menteng, Jakarta Pusat 10310. Indonesia.
Kota	: Jakarta Pusat
Provinsi	: DKI Jakarta
Kode Pos	: 10310
No.Telp. (Kantor)	: +62 021 29557270

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE dan kodifikasi sistem NSN sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan kodifikasi sistem NSN dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 APRIL 2025

Penanggung Jawab

METERAI TEMPEL 10000 EBAFAMX223690495

(Wiliantio)

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA
The City Tower Level 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81
Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia
021-29557270

NOTARIS

REINALDY RYANTO S.H., LL.M., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Tgl. 25 Januari 2010
No. AHU-0238.AH.02.01. Tahun 2010

AKTA	: PENDIRIAN PT JADI SUKSES DIRGANTARA
NOMOR	: 13
TANGGAL	: 26 SEPTEMBER 2016

RUKO GOLDEN 8 G8I NO. 27
JL. KI HAJAR DEWANTARA, SUMMARECON,
GADING SERPONG

PENDIRIAN

PT JADI SUKSES DIRGANTARA

Nomor: 13

Pada hari ini, Senin, tanggal 26-9-2016 (dua puluh --
enam September dua ribu enam belas), ----------
pukul 11.00 (sebelas) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
menghadap kepada saya, REINALDY RYANTO, Sarjana -----
Hukum, Master of Laws, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini: ----------
Tuan WILLIANTO, lahir di Tebing Tinggi, pada --------
tanggal 3-5-1991 (tiga Mei seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -------
partikelir, bertempat tinggal di Sumatera Utara, ----
Jalan Pattimura nomor 23 LK. V, Kelurahan Pasar -----
Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing ---
Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor 1276050305910001), untuk sementara berada -----
di Tangerang; ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
- untuk diri sendiri; ----------
- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara --------
di bawah tangan, tertanggal 21-9-2016 (dua puluh satu
September dua ribu enam belas), bermeterai cukup, ---
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -
1. Nyonya EVI ELYANI, lahir di Tebing Tinggi, pada --
tanggal 17-3-1973 (tujuh belas Maret seribu sembilan-
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Sumatera Utara. ----

REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

Jalan Veteran nomor 13, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ---- (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- nomor 1276055703730002). ----------

2. Tuan KO KIAN KOK, lahir di Tebing Tinggi, pada --- tanggal 17-9-1958 (tujuh belas September seribu ----- sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ---- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Sumatera-Utara, Jalan Pattimura nomor 23 LK. V, Kelurahan ---- Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota ---- Tebing Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk -------- nomor 1276051709580001). ----------

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ------- di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa ---- dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -------- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ---------- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ---- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam-akta pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran ---- Dasar) sebagai berikut: ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- PASAL 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama ----------

---------- PT JADI SUKSES DIRGANTARA ----------

(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan ------- di Jakarta Pusat. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ------

Direksi. ----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------

---------- PASAL 2 ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak --------
terbatas. ----------

------ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------

---------- PASAL 3 ----------

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -------
berusaha dalam bidang perdagangan umum, industri, ---
perbengkelan dan jasa. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --------
di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -
sebagai berikut: ----------
a. melakukan kegiatan usaha perdagangan umum, -------
antara lain perdagangan pesawat beserta suku cadang,-
komponen, aksesoris dan peralatan lainnya yang ------
terkait, perdagangan mesin-mesin turbin, diesel dan -
jenis-jenis mesin lainnya beserta suku cadangnya, ---
perdagangan alat-alat teknik (mekanikal) dan --------
alat-alat elektronika termasuk suku cadang dan ------
aksesorisnya, perdagangan peralatan listrik, --------
perdagangan berbagai jenis kabel antara lain kabel --
data, kabel listrik, dan sejenisnya; ----------
termasuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, -------
perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk -------
perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar --
komisi atau secara amanat, bertindak sebagai --------
leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan -
atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau -----
badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari -

luar negeri; ----------

b. menjalankan industri pada umumnya, antara lain ---
industri pesawat ringan termasuk memproduksi dan/atau
merakit mesin-mesin, suku cadang, komponen dan ------
aksesoris lainnya yang terkait; ----------

c. melakukan kegiatan usaha di bidang perbengkelan --
pada umumnya, antara lain perawatan, modifikasi, ----
pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin serta --------
komponen-komponen pesawat dengan berbagai jenis -----
mesin; ----------

d. melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, -
antara lain jasa reparasi dan pemasangan mesin dan --
peralatan untuk keperluan umum dan industri, jasa ---
perbaikan mesin elektrikal dan mekanikal, jasa ------
pengadaan barang dan jasa, jasa penyewaan mesin dan -
peralatannya, jasa penyimpanan data dan arsip, jasa -
konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi,
jasa pengembangan bisnis, jasa konsultasi bidang ----
industri, jasa penunjang kegiatan penerbangan -------
termasuk penyediaan hanggar dan peralatan penggerak -
pesawat, serta pergudangan untuk penampungan dan ----
penumpukkan barang, jasa pelayanan pemeliharaan, ----
perawatan dan perbaikan pesawat dan ----------
komponen-komponennya, kecuali jasa dalam bidang -----
hukum dan pajak. ----------

---------- MODAL ----------

---------- PASAL 4 ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----------
Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi -----
atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham ------

bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor 60% (enam puluh persen) atau sejumlah -------
600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal ---------
seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta-
Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham akan ----
disebutkan pada akhir akta. ----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -------
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu -
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -------
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang -----
dengan jumlah saham yang mereka miliki ----------
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat -
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -------
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

---------- SAHAM ----------

---------- PASAL 5 ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---

saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --
hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -------
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -------
Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
surat saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -------
dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan ----------
sekurang-kurangnya: ----------
a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat saham; ----------
c. nilai nominal saham; ----------
d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ------
sekurang-kurangnya: ----------
a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat kolektif saham; ----------
c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
d. nilai nominal saham; ----------
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. --------
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -------
ditandatangani oleh seorang Direktur. ----------
10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham; ----------

(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan -- hasil likuidasi; ----------

(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan ---------- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut ----- Undang-Undang). ----------

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham - dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ------- pemiliknya. ----------

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak- berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana - ditetapkan dalam Undang-Undang. ----------

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. ----------

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari- 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut - digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. ----------

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------

---------- PASAL 6 ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, - atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi - mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -- diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ------ Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang --- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --- yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat - saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku- lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis --- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---- saham pengganti. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- PASAL 7 ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -------- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ------- kuasanya yang sah. ----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada ------- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -- persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. - Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, --- para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -------- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat- waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ------

ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ---
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat --------
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---------
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ------
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -------
tersebut. ----------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai --------
ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- PASAL 8 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---
RUPS) adalah: ----------
a. RUPS tahunan; ----------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ------
disebut juga RUPS luar biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam RUPS tahunan: ----------
a. Direksi menyampaikan: ----------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; --
b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -------
mempunyai saldo laba yang positif; ----------
c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. ----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ------
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan. ----------
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan ----------
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----------
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) --------
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------
------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -------
---------- PASAL 9 ----------
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----

kabar. ----------

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --
saham sebelum menyelenggarakan RUPS. ----------

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan -----
penetapan ketua Pengadilan Negeri. ----------

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan. ----------

5. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu,-
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai --------
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan ----
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan sejak ------
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ----
tanggal RUPS diadakan. ----------

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan --------
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ------
ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika-
semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau ----
diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui-
dengan suara bulat. ----------

7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----------
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -
karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu -------
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh -
seorang Direktur. ----------
Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena-
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan ---

kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah ------
seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

------ KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS --------

---------- PASAL 10 ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang telah ---
dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -------
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap -
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -------
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ---------
5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, ----------
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -------
pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan atau
menjadikan jaminan utang yang melebihi dari 50% -----
(lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan -------
diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007-

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. --------

---------- DIREKSI ----------

---------- PASAL 11 ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -- terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi; ---- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi,- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Direktur Utama. ----------

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka - waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ---- Dewan Komisaris. ----------

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----------

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------- perundang-undangan; ----------

c. meninggal dunia; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- PASAL 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ---
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan --
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --

b. menjaminkan atau menjadikan jaminan hutang harta -
kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh ----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; ------

c. menjual aset Perseroan (di luar barang dagangan --
dan aset lancar) sampai dengan 50% (lima puluh ------
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; ------

d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

e. menjual atau dengan cara lain mengalihkan --------
kepemilikan dalam perusahaan lain baik di dalam -----
maupun di luar negeri; ----------

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --------
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan. ----------
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur ---
Utama dalam Anggaran Dasar ini akan ----------
dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga -----
seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas-
nama Direksi dan mewakili Perseroan. ----------

---------- RAPAT DIREKSI ----------

---------- PASAL 13 ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: ----------
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---------
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau ----------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara. ----------
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi. ----------
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ------
panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -------
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ------
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota -
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ---
Direksi yang hadir. ----------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----------
berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. ----------
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-
11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -------

diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ------
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -------
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ------
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 14 ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris; ----------
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ---
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat --
sebagai Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan --------
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ---------
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ------
perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ------ Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ------ diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---------- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---------- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ------ tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----------

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -------- ayat (5); ----------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ----------

d. meninggal dunia; ----------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------

-------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------

---------- PASAL 15 ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan --------- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --

dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -------
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----------
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --
lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas --------
tanggungan Dewan Komisaris. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan --------
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 16 ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -------
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

---------- PASAL 17 ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan --------
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -
buku dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) -
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh - satu) Desember. ----------

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan- ditutup. ----------

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---- tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas). ----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ---------- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ------ diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -- tanggal panggilan RUPS tahunan. ----------

------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ------ merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -------- tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- PASAL 19 ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----------
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ------
dipenuhi oleh cadangan lain. ----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ------
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan --------
Perseroan. ----------
3. Kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ---
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ---------
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ----------
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba. ----------
---------- KETENTUAN PENUTUP ----------
---------- PASAL 20 ----------
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, penghadap yang bertindak sebagaimana ------
tersebut di atas menerangkan bahwa: ----------
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 600 (enam ratus) saham atau seluruhnya -----
dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus ---
juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri: ----------
- Nyonya EVI ELYANI, --------
sebanyak 588 (lima ratus ----
delapan puluh delapan) saham-

dengan nilai nominal --------
seluruhnya sebesar ..... Rp 588.000.000,-
(lima ratus delapan puluh ---
delapan juta Rupiah); -------
- Tuan KO KIAN KOK, ---------
sebanyak 12 (dua belas) saham
dengan nilai nominal --------
seluruhnya sebesar ..... Rp 12.000.000,-
(dua belas juta Rupiah); ----
- sehingga seluruhnya -------
berjumlah 600 (enam ratus) --
saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar ..... Rp 600.000.000,-
(enam ratus juta Rupiah). ---
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ------
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai ----------
- Direktur : Tuan WILLIANTO, tersebut; ---------
- Komisaris : Nyonya EVI ELYANI, tersebut. ------
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. ----------
Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan: ------
1. kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----
para pihak yang namanya tersebut dalam akta ini; dan-
2. kebenaran isi dan tanda tangan dari Surat Kuasa --
dan Surat-Surat Pernyataan yang dibuat secara -------
di bawah tangan, bermeterai cukup, yang disampaikan -
dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, sebelum ---

akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab -------
sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, sehingga --
apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta --
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk ----
apapun yang disebabkan karena akta ini, maka --------
penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji
dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan -------
saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung -
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya ---
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. --
Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. ----------
---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------
Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Tuan HADI SARWITO, lahir di Kulon Progo, pada -------
tanggal 28-7-1971 (dua puluh delapan Juli seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Istimewa -----
Yogyakarta; dan ----------
Tuan ERI IRAWAN SETIADI, lahir di Cilacap, pada -----
tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta; ----------
keduanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara ----
berada di Tangerang, sebagai para saksi. ----------
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya. -------

Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ------
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini, sedangkan penghadap selain -
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari
kanan pada lembar kertas yang dijahitkan pada minuta-
akta ini. ----------

Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa
coretan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten
Tanggerang, ---------

REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN

REINALDY RYANTO, ---
S.H., LL.M., M.Kn. -

Halaman Pertama

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043884.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JADI SUKSES DIRGANTARA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REINALDY RYANTO SH.,LL.M.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh REINALDY RYANTO SH.,LL.M.,M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT JADI SUKSES DIRGANTARA tanggal 30 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016093031104650 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JADI SUKSES DIRGANTARA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JADI SUKSES DIRGANTARA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 13 Tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Notaris REINALDY RYANTO SH.,LL.M.,M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116421.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 04 Oktober 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043884.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JADI SUKSES DIRGANTARA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 600.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WILLIANTO	DIREKTUR	-	-	0
EVI ELYANI	KOMISARIS	-	588	588.000.000,00
KO KIAN KOK	-	-	12	12.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116421.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 04 Oktober 2016

NOTARIS & PPAT

REINALDY RYANTO S.H., LL.M., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tgl. 2 November 2020 No. AHU-00043.AH.02.02.Tahun 2020

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tgl. 20 April 2021 No. 511/SK-400.HR.03.04/IV/2021

AKTA	: PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT JADI SUKSES DIRGANTARA
NOMOR	: 2
TANGGAL	: 6 SEPTEMBER 2021

Jl. Mangga II No. 43, Jakarta Barat 11510
Telp: +62 (21) 5688441,
Email: notaris@notarisreinaldy.web.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT JADI SUKSES DIRGANTARA

Nomor: 2

Pada hari ini, Senin, tanggal 6-9-2021 (enam --------
September dua ribu dua puluh satu), ----------
pukul 17.15' (tujuh belas lewat lima belas menit) ---
Bagian Barat Waktu Indonesia, ----------
berhadapan dengan saya, REINALDY RYANTO, Sarjana ----
Hukum, Master of Laws, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi ---
yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut ---
pada bagian akhir akta ini: ----------
Nyonya LINDA RINI PREATININGSIH, lahir di Semarang, -
pada tanggal 22-10-1987 (dua puluh dua Oktober ------
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga ---
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat --------
tinggal di Jakarta, Kelapa Gading Timur, Rukun ------
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kelapa -----
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3172066210870004); ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
selaku kuasa dari para pemegang saham PT JADI SUKSES-
DIRGANTARA, sebagaimana ternyata dari akta Keputusan-
Para Pemegang Saham PT JADI SUKSES DIRGANTARA yang --
dibuat secara di bawah tangan, tertanggal 2-9-2021 --
(dua September dua ribu dua puluh satu), bermeterai -
cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -
(selanjutnya disebut Keputusan Para Pemegang Saham).-
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------

REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn. NOTARIS JAKARTA BARAT

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -------
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ----------
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang --------
Saham, PT JADI SUKSES DIRGANTARA, berkedudukan ------
di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat -----
dalam akta pendirian tertanggal 26-9-2016 (dua ------
puluh enam September dua ribu enam belas) nomor 13, -
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ---------
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
4-10-2016 (empat Oktober dua ribu enam belas) -------
nomor AHU-0043884.AH.01.01.TAHUN 2016, dan ----------
perubahannya beserta perubahan anggota Direksi ------
dan Dewan Komisaris PT JADI SUKSES DIRGANTARA -------
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ---------
tertanggal 10-7-2019 (sepuluh Juli dua ribu ---------
sembilan belas) nomor 21, dibuat di hadapan ---------
Nyonya ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia tertanggal 19-7-2019 (sembilan ---
belas Juli dua ribu sembilan belas) ----------
nomor AHU-0039102.AH.01.02.TAHUN 2019, dan telah ----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Data Perseroan PT JADI SUKSES DIRGANTARA --
tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua ribu -
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0300226 ----------
(selanjutnya disebut Perseroan), telah mengambil ----
keputusan yang disetujui oleh: ----------
1. Nyonya EVI ELYANI, lahir di Tebing Tinggi,--------
pada tanggal 17-3-1973 (tujuh belas Maret seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ------
Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal -
di Sumatera Utara, Jalan Veteran nomor 13, Kelurahan-
Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, ---
Kota Tebing Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan 1276055703730002), --
selaku pemilik/pemegang 588 (lima ratus delapan -----
puluh delapan) saham dalam Perseroan. ----------
2. Tuan WILLIANTO, lahir di Tebing Tinggi, pada -----
tanggal 3-5-1991 (tiga Mei seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -------
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Sumatera ----
Utara, Jalan Pattimura nomor 23 LK.V, Rukun ---------
Tetangga 005, Rukun Warga 000, Kelurahan Pasar ------
Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing ---
Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 1276050305910001); ----------
dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari ------
almarhum Tuan KO KIAN KOK, yang telah meninggal -----
dunia, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta ------
Kematian tertanggal 31-5-2021 (tiga puluh satu Mei --
dua ribu dua puluh satu) nomor 1276-KM-31052021-0013,
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota -

Tebing Tinggi, berdasarkan surat Kesepakatan Bersama-
Segenap Ahli Waris Almarhum Tuan KO KIAN KOK (KIAN --
KOK) tertanggal 25-8-2021 (dua puluh lima Agustus ---
dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, yang ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----
pemegang/pemilik 12 (dua belas) saham dalam ---------
Perseroan. ----------
Sehingga dengan demikian, Keputusan Para Pemegang ---
Saham tersebut telah disetujui oleh pemegang/pemilik-
saham yang mewakili 600 (enam ratus) saham, atau yang
merupakan semua saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----------
B. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang ---------
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --------
Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil dengan ---
cara tersebut di atas mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham. ----------
C. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -------
tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk -------
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ---
dalam suatu akta Notaris. ----------
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, menyatakan Keputusan Para Pemegang-
Saham tertanggal 2-9-2021 (dua September dua ribu ---
dua puluh satu) tersebut, sebagai berikut: ----------
I. Memberikan persetujuan atas penegasan alamat -----
Perseroan. ----------
II. Memberikan persetujuan atas pengalihan hak-hak --
atas saham dalam Perseroan karena pewarisan milik ---

Almarhum Tuan KO KIAN KOK, tersebut, kepada --------
Tuan WILLIANTO, tersebut, sebanyak 12 (dua belas) ---
saham dalam Perseroan; ----------
sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan --------
kepemilikan saham Perseroan ditetapkan sebagai ------
berikut: ----------

- Tuan WILLIANTO, ----------
sebanyak 12 (dua belas) ----
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar ..... Rp 12.000.000,-
(dua belas juta Rupiah); ---
- Nyonya EVI ELYANI, -------
sebanyak 588 (lima ratus ---
delapan puluh delapan) -----
saham dengan nominal -------
seluruhnya sebesar ..... Rp 588.000.000,-
(lima ratus delapan puluh --
delapan juta Rupiah); ------
- sehingga seluruhnya ------
berjumlah 600 (enam ratus) -
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar ..... Rp 600.000.000,-
(enam ratus juta Rupiah). --

III. Memberikan persetujuan atas perubahan maksud ---
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan karenanya -
mengubah bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai ----
berikut: ----------

------ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------

---------- PASAL 3 ----------

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -------
berusaha dalam bidang: ----------
a. aktivitas konsultasi manajemen lainnya; ----------
b. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; ----
c. industri senjata dan amunisi; ----------
d. perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil;-
e. perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan ---
aksesorinya; ----------
f. perdagangan besar padi dan palawija; ----------
g. perdagangan besar hasil perikanan; ----------
h. perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan; -
i. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil-
pertanian lainnya; ----------
j. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; ---
k. perdagangan besar tekstil; ----------
l. perdagangan besar pakaian; ----------
m. perdagangan besar alas kaki; ----------
n. perdagangan besar alat tulis dan gambar; ---------
o. perdagangan besar barang percetakan dan ----------
penerbitan dalam berbagai bentuk; ----------
p. perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;
q. perdagangan besar kosmetik untuk manusia; --------
r. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan -----
rumah tangga; ----------
s. perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan
rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam ------
lainnya; ----------
t. perdagangan besar komputer dan perlengkapan ------
komputer; ----------
u. perdagangan besar piranti lunak; ----------

v. perdagangan besar suku cadang elektronik; --------
w. perdagangan besar peralatan telekomunikasi; ------
x. perdagangan besar mesin kantor dan industri ------
pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya; --------
y. perdagangan besar alat transportasi laut, suku ---
cadang dan perlengkapannya; ----------
z. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan -
mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan
perlengkapannya; ----------
aa. perdagangan besar alat transportasi udara, suku -
cadang dan perlengkapannya; ----------
bb. perdagangan besar mesin, peralatan dan ----------
perlengkapan lainnya; ----------
cc. perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan ---
gas dan produk yang berkaitan dengan itu; ----------
dd. perdagangan besar logam dan bijih logam; --------
ee. perdagangan besar barang logam untuk bahan ------
konstruksi; ----------
ff. perdagangan besar berbagai macam material -------
bangunan; ----------
gg. perdagangan besar bahan dan barang kimia; -------
hh. perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia; ---
ii. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi
dan alat kedokteran untuk manusia; ----------
jj. perdagangan besar barang dari kertas dan karton.-
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut: ----------
a. menjalankan kegiatan usaha aktivitas konsultasi --
manajemen lainnya, antara lain mencakup ketentuan ---

bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha ----
dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, --
seperti perencanaan strategi dan organisasi, --------
keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan -----
kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan -------
kebijakan sumber daya manusia, perencanaan ----------
penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan ---
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai -
fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh ---------
agronomist dan agricultural economist pada bidang ---
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan -
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan --
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam --
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan --------
pengawasan, informasi manajemen, termasuk jasa ------
pelayanan studi investasi infrastruktur; ----------
b. menjalankan kegiatan usaha real estat yang -------
dimiliki sendiri atau disewa, antara lain mencakup --
usaha pembelian, penjualan, persewaan dan ----------
pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri -
maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -
hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas ---
penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan ----
lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau -------
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan
secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, ---
termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan -----
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan --
ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat

menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan --
pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang -------
bisa dipindah-pindah; ----------
c. menjalankan kegiatan usaha industri senjata dan --
amunisi, antara lain mencakup pembuatan senjata -----
berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung --
torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ----
ringan/kecil (revolver, senapan, senapan mesin ------
ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan ---
senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol
dan amunisi perang, termasuk pembuatan senjata api --
untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan -------
amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, -------
torpedo, ranjau, roket, dan sejenisnya; ----------
d. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
suku cadang dan aksesori mobil, antara lain ---------
mencakup usaha perdagangan berbagai suku cadang, ----
komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari ------
perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, ----
busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan ---
bagian-bagian kelistrikan; ----------
e. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, antara ----
lain mencakup perdagangan suku cadang sepeda motor --
dan aksesorinya; ----------
f. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar padi-
dan palawija, antara lain mencakup perdagangan hasil-
pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan ---
baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya,
seperti padi, jagung, gabah, gandum dan seralia -----

lainnya, termasuk perdagangan besar benih dan bibit - padi, palawija, dan serealia lainnya; ----------

g. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- hasil perikanan, antara lain mencakup perdagangan --- hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar - dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, ------ kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga-karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, --- serta bibit hasil perikanan; ----------

h. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- hasil kehutanan dan perburuan, antara lain mencakup - perdagangan hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan-hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu ------ cendana, getah damar, termasuk perdagangan besar ---- bibit tanaman kehutanan, dan sejenisnya; ----------

i. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, -- antara lain mencakup perdagangan bahan makanan dan -- minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman ---- bumbu-bumbuan dan rempah-rempah; ----------

j. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- makanan dan minuman lainnya, antara lain mencakup --- perdagangan makanan dan minuman lainnya, seperti ---- tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, ------- karamel, madu olahan, kerupuk udang, termasuk ------- pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, ----- anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food ------ additive), bahan penolong (processing aid), makanan - ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk

kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar -
makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; -----
k. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
tekstil, antara lain mencakup usaha perdagangan -----
hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam ------
tekstil/kain, kain batik dan lain-lain, termasuk ----
perdagangan besar barang linen rumah tangga (bahan --
kain untuk keperluan rumah tangga), dan sejenisnya; -
l. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
pakaian, antara lain mencakup perdagangan pakaian, --
termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar -----
aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan ---
penjepit, termasuk perdagangan besar kaos kaki; -----
m. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
alas kaki, antara lain mencakup perdagangan alas ----
kaki, seperti sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya;-
n. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
alat tulis dan gambar; ----------
o. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai -----
bentuk, antara lain mencakup perdagangan barang -----
percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, ----
seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan ---------
sejenisnya; ----------
p. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
alat fotografi dan barang optik, antara lain --------
mencakup perdagangan alat fotografi dan barang optik-
(seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar); ----
q. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
kosmetik untuk manusia, antara lain mencakup --------

perdagangan kosmetik untuk manusia seperti parfum, --
sabun, bedak dan sejenisnya; ----------
r. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara -----
lain mencakup perdagangan peralatan dan perlengkapan-
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga ----------
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan -
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, -
televisi, perekam dan pemutar compact Disc (CD) dan -
Digital Video Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol
video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan
minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, --
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman -----
dan barang dari gabus, karpet, dan sejenisnya; ------
s. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya
yang tidak termasuk dalam lainnya, antara lain ------
mencakup perdagangan berbagai barang dan perlengkapan
rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari ----
kulit, koper, alat-alat pembersih, dan sejenisnya, --
termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, compact
Disc (CD) dan Digital Video Disc (DVD), barang kimia-
untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai, -----
dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dan ---
sejenisnya; ----------
t. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
komputer dan perlengkapan komputer, dan sejenisnya; -
u. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
piranti lunak, dan sejenisnya; ----------
v. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----

suku cadang elektronik, antara lain mencakup usaha --
perdagangan katup dan tabung elektronik, peralatan --
semi konduktor, mikrochip, Integrated Circuit (IC) --
dan Printed Circuit Board (PCB), dan sejenisnya; ----
w. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
peralatan telekomunikasi, antara lain mencakup ------
perdagangan peralatan telekomunikasi, seperti -------
perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk -------
peralatan penyiaran radio dan televisi; ----------
x. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang ---
dan perlengkapannya, antara lain mencakup perdagangan
mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, ---
serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula,-
turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam-
mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, ----
termasuk perdagangan besar robot-robot produksi -----
pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk ----
dalam lainnya untuk keperluan industri, dan mesin ---
yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil ---
serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan -------
komputer, dan sejenisnya; ----------
y. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat-
transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, -
antara lain mencakup perdagangan macam-macam alat ---
transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, --
termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku ---
cadang dan perlengkapannya; ----------
z. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, -

dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, ---
antara lain mencakup perdagangan macam-macam alat ---
transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor -
(bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk-
usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan -
perlengkapannya; ----------
aa. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat
transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya,-
antara lain mencakup perdagangan macam-macam alat ---
transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar-
macam-macam suku cadang dan perlengkapannya; --------
bb. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, antara ---
lain mencakup usaha perdagangan mesin dan peralatan -
serta perlengkapan lain, seperti perdagangan besar --
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi --
peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas ---
mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, ------
perkakas mesin yang dikendalikan komputer, peralatan,
perlengkapan pengukuran, dan sejenisnya; ----------
cc. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang -----
berkaitan dengan itu, antara lain mencakup ----------
perdagangan bakar gas, cair, dan padat serta produk -
sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak ------
mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar ---
oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu ----
bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, ----
nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan ------
bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, ---

gas butana dan propana) dan minyak semir, minyak ----
pelumas dan produk minyak bumi yang telah ----------
dimurnikan, serta bahan bakar nuklir; ----------
dd. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
logam dan bijih logam, antara lain mencakup ---------
perdagangan bijih logam dan logam dasar, seperti ----
bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, -
seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi,-
baja dan perdagangan besar produk logam besi dan ----
bukan besi setengah jadi yang tidak termasuk dalam --
lainnya, termasuk perdagangan besar emas dan logam --
mulia lain (perak, platina); ----------
ee. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
barang logam untuk bahan konstruksi, antara lain ----
mencakup perdagangan berbagai macam baja/besi untuk -
bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil,-
pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat-
tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel,
kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling -
door, awning dan seng lembaran; ----------
ff. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
berbagai macam material bangunan, antara lain -------
mencakup perdagangan macam-macam material bangunan, -
seperti semen, pasir, paku, cat, dan sejenisnya; ----
gg. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
bahan dan barang kimia, antara lain mencakup --------
perdagangan bahan dan barang kimia dasar atau kimia -
industri, seperti tinta printer, minyak esensial, ---
gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, -
metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam ---

industri, asam dan sulfur, dan sejenisnya; ----------
hh. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
pupuk dan produk agrokimia, antara lain mencakup ----
perdagangan pupuk dan produk agrokimia atau kimia ---
pertanian; ----------
ii. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran -
untuk manusia, antara lain mencakup perdagangan -----
alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran -
untuk manusia; ----------
jj. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----
barang dari kertas dan karton; ----------
- termasuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, -----
perdagangan antar pulau dan lokal, baik secara ------
langsung atau melalui media lainnya antara lain dari-
katalog, telepon, televisi, internet, media massa, --
dan sejenisnya, baik untuk perhitungan orang atau ---
badan hukum lain atas dasar balas jasa (komisi) atau-
secara kontrak atau secara amanat, bertindak sebagai-
leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan -
atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau -----
badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari -
luar negeri. ----------
IV. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ---
Direksi Perseroan dan/atau Nyonya LINDA RINI --------
PREATININGSIH, tersebut, baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --------
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----
memohon persetujuan perubahan anggaran dasar --------
Perseroan, dan memberitahukan perubahan data --------

Perseroan ini kepada instansi yang berwenang, dan ---
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
apapun agar diterimanya permohonan dan pemberitahuan-
tersebut, serta mengajukan, menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat ------
kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang -------
diperlukan. ----------
Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin-
akan: ----------
1. kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----
para pihak yang namanya tersebut dalam akta ini; dan-
2. kebenaran isi dan tanda tangan dari Keputusan Para
Pemegang Saham dan surat-surat lainnya yang dibuat --
secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ------
disampaikan dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris,
sebelum akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab
sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, sehingga --
apabila di kemudian hari timbul sengketa dengan nama-
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta -
ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan --
ini berjanji untuk bertanggung jawab dan bersedia ---
menanggung segala resiko yang timbul dan dengan ini -
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, -
Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab -
dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat --
hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ---------
Penghadap menyatakan telah membaca, mengetahui, -----
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan ---------
membubuhkan paraf disetiap halaman akta, dan kemudian
penghadap membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada-

lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan ----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. --
---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
1. Nyonya RETNA SARI, lahir di Jakarta, pada --------
tanggal 9-9-1992 (sembilan September seribu sembilan-
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta; dan ----------
2. Tuan ERI IRAWAN SETIADI, lahir di Cilacap, pada --
tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta; ----------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ------
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris. ----------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta -

Batas, ----------

REINALDY RYANTO, ---
S.H., LL.M., M.Kn. -

Halaman Pertama

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0048453.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JADI SUKSES DIRGANTARA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REINALDY RYANTO S.H., L.L.M., M.KN. sesuai salinan akta nomor 2 Tanggal 06 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT JADI SUKSES DIRGANTARA tanggal 08 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021090831240652 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT JADI SUKSES DIRGANTARA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT JADI SUKSES DIRGANTARA - dengan NPWP 804463073026000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 2 Tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris REINALDY RYANTO S.H., L.L.M., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153425.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Jakarta, 8 September 2021
Notaris di Jakarta Barat,

REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0048453.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JADI SUKSES DIRGANTARA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 600.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WILLIANTO	DIREKTUR	-	12	Rp. 12.000.000
EVI ELYANI	KOMISARIS	-	588	Rp. 588.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153425.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0445845
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT JADI SUKSES DIRGANTARA**

Kepada Yth.
Notaris REINALDY RYANTO S.H., L.L.M., M.KN.
Jl. Mangga II No. 43
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris REINALDY RYANTO S.H., L.L.M., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Peralihan Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT JADI SUKSES DIRGANTARA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153425.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Jakarta, 8 September 2021
Notaris Jakarta Barat,

REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120117132824

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT JADI SUKSES DIRGANTARA
2. Alamat Kantor	: The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10310
No. Telepon	: 021-29557270
Email	: pt.jadisuksesdirgantara@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 November 2018

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 September 2021

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120117132824

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10310	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

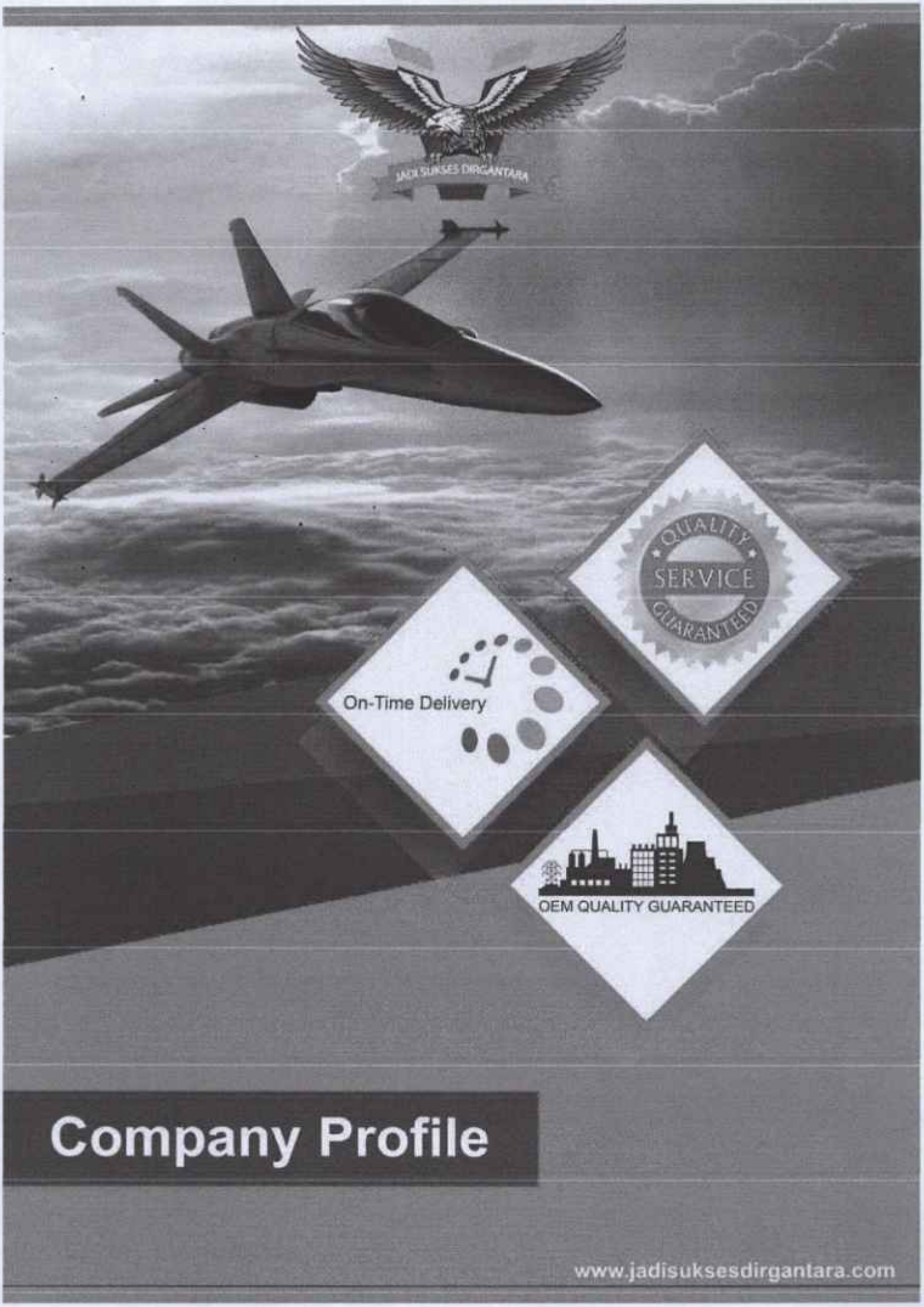
JADI SUKSES DIRGANTARA
QUALITY
SERVICE
GUARANTEED
On-Time Delivery
OEM QUALITY GUARANTEED
Company Profile
www.jadisuksesdirgantara.com

OUR PROFILE

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA didirkan pada tanggal 26 September 2016 sesuai dengan akta pendirian perusahaan no. 13, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 4 Oktober 2016, dengan nomor AHU-0116421.AH.01.11Tahun 2016.

Perusahaan ini didirikan dengan semangat dan dukungan dari beberapa supplier dan OEM suku cadang pesawat terkemuka yang berada di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia.

Dengan dukungan dari pihak OEM yang jelas, PT. Jadi Sukses Dirgantara dengan prinsip "On Time Delivery", "Quality Service Guaranteed", serta "OEM Quality Guaranteed", bekerja keras di dalam lingkungan TNI dalam pengadaan dan perbaikan suku cadang pesawat militer TNI, terutama TNI AU.

PT. Jadi Sukses Dirgantara memiliki karyawan yang telah berpengalaman luas menjalankan usaha di lingkungan TNI AU, dan telah dikenal sebagai mitra yang memiliki prinsip, integritas,serta komitmen yang kuat dalam menjalankan proyek di lingkungan kerja.

QUALITY SERVICE GUARANTEED

On-Time Delivery

OEM QUALITY GUARANTEED

VISION

Perusahaan yang bertaraf International dan terkemuka.

MISSION

Perusahaan yang professional dalam memasok suku cadang serta memperbaiki suku cadang pesawat dengan tingkat qualitas yang terjamin oleh OEM, dan tingkat ketepatan waktu pengiriman.

OUR PRINCIPAL

CURTIN AERO TECH PTE.LTD
101 Cecil Street #11-04
Singapore 069533
Singapore.

OUR TEAM

DIREKTUR UTAMA	*: Willianto*
KOMISARIS	*: Evi Elyani Unggul*
PEMEGANG SAHAM	*: Kho Kian Kok*
USA REPRESENTATIVE	*: Jean*

OUR CAPABILITIES

SU-27

SU-30

SU-35

HAWK

F-16

EMB-314

T-50i

CN-235

Grob

Boeing 737-200

Boeing 737-400

Boeing 737-500

NAS-332

SA-330

Partnership

Honeywell

MOOG

Parker

LinTech Components

Pratt & Whitney
A United Technologies Company

Esterline

SAFRAN

TACTAIR
FLUID CONTROLS INC.

Rockwell Collins

ESSEX
INDUSTRIES

EATON

EW
EAST/WEST
AN INNOVATIVE COMPANY

COBHAM

AMETEK®

AeroSafe
"Safety is our concern"

HARTZELL

ZODIAC AEROSPACE

Kompleks Ruko Bahan Bangunan Blok F7 No. 12
Jalan Mangga Dua Raya
Jakarta Pusat 10370
Indonesia
Contact : + 62 878 686 849 51
www.jadisuksesdirgantara.com

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA
80.446.307.3-026.000
JADI SUKSES DIRGANTARA
NPWP16 : 0804 4430 7302 6000
GEDUNG THE CITY TOWER LANTAI 12 UNIT IN JL MH THAMRIN, B1, MENTENG, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10310
Tanggal Terdaftar 03/11/2016
djp

www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	: WILLIANTO
Tempat, Tanggal Lahir	: Tebing tinggi 03 Mei 1991
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 1276050305910001
No. Telepon	: 81317094898
Email	: pt.jadisuksesdirgantara@gmail.com
Alamat	: The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan	:
Nama Pelaku Usaha	: PT JADI SUKSES DIRGANTARA
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha	: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Pusat, 10 Maret 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(WILLIANTO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
2	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
3	The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
4	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
5	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
6	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
7	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
8	The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jl. MH. Thamrin No.81 Rt.003 Rw.006, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	20 M^2	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Wilianto
Jabatan	:	Direktur
PT / CV	:	PT. Jadi Sukses Dirgantara
Alamat	:	The City Tower Lantai 12 Unit 1N Jl. MH Thamrin No. 81 Menteng, Jakarta Pusat 10310. Indonesia. Jakarta Pusat

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama	:	Ariel
Jabatan	:	Staff Marketing
NIK	:	32160121030100006

Selanjutnya didalam Surat Kuasa ini disebut PENERIMA KUASA guna bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA untuk pengurusan dokumen administrasi dan mewakili direktur dalam rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kodifikasi materiil sistem NCAGE (NATO Commercial And Government Entity) serta sertifikat kodifikasi materiil sistem NSN (NATO stock number / nomor sediaan nasional) penerbitan kodifikasi sistem NSN di Kemhan UO lingkungan TNI AU.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 April 2025

Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
Ariel	Wilianto Direktur

Rab 211-

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KONTRAK JUAL BELI
NOMOR : TRAK/ 133 / HARWAT/III/2025/AU

ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN SARANA PERTAHANAN

DENGAN

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA

DIBUAT DI : JAKARTA

TANGGAL : 14 MARET 2025

PEMBELI	PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KONTRAK JUAL BELI

NAMA MATERIIL : PENGADAAN SUKU CADANG AWP TCI/KRITIS PESAWAT T-50I PAKET 8 TNI AU

NOMOR : TRAK/ 133 /HARWAT/III/2025/AU

TANGGAL : 14 MARET 2025

PROGRAM/ANGGARAN : MODERNISASI ALUTSISTA, NON ALUTSISTA DAN SARPRAS PERTAHANAN TA. 2025

PEMBELI	PENJUAL

DAFTAR ISI

PASAL	URAIAN	HALAMAN
1.	PERSYARATAN UMUM KONTRAK	2
2.	MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN	4
3.	HARGA KONTRAK	5
4.	SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN	6
5.	PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA	6
6.	ASAL/TEMPAT PENGADAAN DAN PENYERAHAN	7
7.	DENDA DAN KEADAAN KAHAR	8
8.	*WARRANTY*	9
9.	HAK PATEN, HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN	10
10.	PERSELISIHAN	11
11.	PEMUTUSAN KONTRAK	11
12.	JAMINAN PELAKSANAAN	12
13.	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL, KODIFIKASI DAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN	13
14.	AMANDEMEN	15
15.	HAL LAIN-LAIN	16
16.	PEMENUHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PENGADAAN	16
17.	EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK	17
18.	TANDA TANGAN	18

PEMBELI	PENJUAL

1.2.3. "ALAMAT" berarti:
Semua surat menyurat antara PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Alamat PEMBELI:

KEPALA PUSAT ALAT PERALATAN PERTAHANAN
BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
JALAN MERDEKA BARAT NO. 13-14
JAKARTA 10110 – INDONESIA
TELP. (62-21) 3828081
FAX. (62-21) 3828081

dengan tembusan:

1. ASISTEN LOGISTIK KEPALA STAF TNI AU
MARKAS BESAR TNI AU CILANGKAP
JAKARTA 13780
TELP: 62-21-8709496
FAKS: 62-21-8709496

2. KEPALA DINAS PENGADAAN ANGKATAN UDARA
MARKAS BESAR TNI AU CILANGKAP
JAKARTA 13780
TELP: 62-21-3829188
FAKS: 62-21-3457188

Alamat PENJUAL:

DIREKTUR
PT. JADI SUKSES DIRGANTARA
GEDUNG THE CITY TOWER LANTAI 12 UNIT 1N
JL. MH THAMRIN, 81, MENTENG, MENTENG,
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10310
No.Telp: 021-29557270

1.3. HUKUM DAN PERATURAN.

Pelaksanaan kontrak ini tunduk dan mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 2

MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN

MATERIIL KONTRAK yang akan diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam uraian materiil kontrak pada Lampiran "A" dan uraian rincian SPESIFIKASI TEKNIS pada Lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

PEMBELI	PENJUAL

PASAL 3

HARGA KONTRAK

3.1. TOTAL HARGA KONTRAK adalah sebesar Rp 13.462.149.000,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), DAP (*Delivery At Place*) dhi. MATERIIL KONTRAK diterima di GPL Iswahjudi, Madiun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A".

3.2. Harga MATERIIL KONTRAK tersebut pada Sub Pasal 3.1. tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyerahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.03/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Penyerahan yang akan difasilitasi oleh PEMBELI dhi. Bagmalur Setbaranahan Kemhan. Apabila terjadi penolakan terhadap Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN penyerahan yang di ajukan, maka pembayaran PPN Penyerahan menjadi tanggung jawab PENJUAL.

3.3. Total HARGA KONTRAK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.1. tidak termasuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sehingga PEMBELI akan mengajukan permohonan Pembebasan atas Bea Masuk dan PDRI kepada Kepala Kantor Kepabeanan dan Kantor Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Import Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara dengan bukti Surat Pernyataan Barang Impor (SP-1) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.03/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN Impor yang akan difasilitasi oleh PEMBELI dhi. Bagmalur Setbaranahan Kemhan. Apabila terjadi penolakan terhadap Surat Pernyataan Barang Impor (SP-1) dan SKTD PPN Impor yang diajukan, maka pembayaran Bea Masuk dan PDRI menjadi tanggung jawab PENJUAL.

3.4. Harga MATERIIL KONTRAK adalah harga pasti, perubahan harga tidak dibenarkan setelah KONTRAK ditandatangani.

3.5. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakwajaran harga berdasarkan hasil REVIU APIP/BPKP, maka akan dilaksanakan Amandemen KONTRAK yang didahului dengan negosiasi ulang dan selanjutnya pihak PENJUAL bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil reviu tersebut.

PEMBELI	PENJUAL

PASAL 4

SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

4.1. Pembayaran TOTAL HARGA KONTRAK yang terinci pada Pasal 3. akan dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari PEMBELI kepada PENJUAL dalam mata uang Rupiah setelah diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar dari PENJUAL, dengan jumlah TOTAL HARGA KONTRAK Rp 13.462.149.000,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melalui:

Bank PENJUAL:

Bank	: Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading
Alamat bank	: Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LA 6-7 No. 1,2,3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, 14240
Atas Nama	: PT JADI SUKSES DIRGANTARA
No Rekening	: 502716693

Semua pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut:

4.2. PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN AKHIR.

Pembayaran atas Pelaksanaan Penerimaan Akhir sebesar 100% (seratus persen) dari TOTAL HARGA KONTRAK atau senilai Rp 13.462.149.000,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) akan dibayarkan atas penyerahan dokumen-dokumen sebagai berikut:

4.2.1. KWITANSI PERUSAHAAN.
4.2.2. FAKTUR PAJAK/INVOICE.
4.2.3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL.
4.2.4. BERITA ACARA CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
4.2.5. SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR.

PASAL 5

PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA

5.1. MATERIIL KONTRAK tersebut dalam Pasal 2. harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai standar pengemasan. Mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENJUAL.

5.2. TANDA-TANDA.

5.2.1. Tanda-tanda adalah sebagai berikut:

PEMBELI	PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN SARANA PERTAHANAN
GUDANG MALUR SETBARANAHAN KEMHAN JAKARTA
CQ. (GPL ISWAHJUDI, MADIUN)

Nomor Kontrak : ..... tanggal.....
Peti/Kardus Nomor : .....dari.....
Berat :.....kg
Ukuran : ....X.....X.....cm

5.2.2. Peti harus diberi nomor urut dimulai dari nomor 1 (satu).

PASAL 6

ASAL/TEMPAT PENGADAAN DAN PENYERAHAN

6.1. MATERIIL KONTRAK berupa Pengadaan Suku Cadang AWP TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 8 TNI AU berasal dari PT. Jadi Sukses Dirgantara yang didukung oleh principal Curtin Aero Tech Pte. Ltd., Singapura dan asal barang dari Three Stars Aerospace LLC, USA sesuai Lampiran "B".

6.2. MATERIIL KONTRAK akan diserahkan oleh PENJUAL dalam keadaan baik dan siap dipakai, serta dilengkapi *Certificate of Conformity (CoC) / Certificate of Compliance (COC) / Airworthiness Review Certificate (ARC), atau Certificate of Manufacture (CoM) atau Certificate of Origin (CoO)* serta memenuhi persyaratan sesuai jumlah dan spesifikasi teknis yang tercantum pada Lampiran "A" dan "C" dengan waktu penyerahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan KONTRAK secara administratif melalui Gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Pusbekmatau dengan tempat penerimaan akhir di GPL Iswahjudi, Madiun. Apabila terdapat perubahan tempat penerimaan materiil akan dilaksanakan melalui mekanisme konfirmasi.

6.3. Penyerahan dianggap selesai apabila:

6.3.1. MATERIIL KONTRAK diterima di Fasilitas PENGGUNA secara administrasi melalui gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Pusbekmatau, dilengkapi dengan semua dokumen standar dan sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini, serta dibuktikan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL tersebut menjadi dasar penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR oleh PEMBELI.

6.3.2. Seluruh kewajiban PENJUAL sesuai pasal 6. dan pasal 13. kecuali pasal 8 telah dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR yang akan diterbitkan oleh PEMBELI.

PEMBELI	PENJUAL

6.4. Dalam hal MATERIIL KONTRAK yang dipesan terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan KONTRAK selama dalam proses di gudang PENGGUNA, maka PENJUAL berkewajiban untuk mengganti dalam waktu sesingkat-singkatnya. Barang yang rusak atau tidak sesuai dengan KONTRAK tersebut dianggap belum diterima, sehingga PENJUAL dikenakan denda sebagaimana diatur pada Pasal 7.1. dengan tetap dikenakan kewajiban untuk menggantinya. Denda tidak dikenakan apabila penyerahan belum melampaui waktu yang telah ditentukan dalam KONTRAK. Pemberitahuan tentang kerusakan atau ketidaksesuaian MATERIIL KONTRAK tersebut disampaikan kepada pihak PENJUAL oleh PEMBELI tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah MATERIIL KONTRAK diperiksa di fasilitas PENGGUNA.

PASAL 7

DENDA DAN KEADAAN KAHAR

7.1. DENDA.

7.1.1. Apabila MATERIIL KONTRAK tidak diserahkan seperti yang ditetapkan pada Pasal 6.1. untuk alasan-alasan di luar dari Pasal 7.2. maka PENJUAL akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari harga MATERIIL KONTRAK yang terlambat.

7.1.2 Apabila MATERIIL KONTRAK yang terlambat adalah merupakan suatu kesatuan sistem maka pemberlakuan denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari harga 1 (satu) sistem yang terlambat.

7.1.3. Denda disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi mitra kerja KPPN dan Copy dari bukti transfer harus dikirim selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja melalui faximili kepada Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Direktur Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Kabag Proglap Setbaranahan Kemhan.

7.1.4. Denda harus dibayar sebelum pengajuan pembayaran MATERIIL KONTRAK.

7.2. KEADAAN KAHAR.

7.2.1. Untuk tujuan KONTRAK ini, maka keadaan kahar berarti hal yang tidak terduga dan merupakan situasi tidak terhindar yang diluar kemampuan PENJUAL. Situasi yang bukan merupakan kelalaian dari PENJUAL adalah hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada perang, kerusuhan, revolusi, tindakan terorisme, hanya bilamana hal ini berakibat langsung dan bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan, pemogokan, kebakaran, sabotase, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PENJUAL atas KONTRAK ini. PENJUAL tidak dapat dikenakan tanggung jawab dalam hal PENJUAL

PEMBELI	PENJUAL

gagal memenuhi kewajibannya pada KONTRAK ini oleh karena keadaan kahar. Dalam hal ini jangka waktu penyerahan akan diperpanjang seperlunya tetapi tidak lebih dari 4 (empat) bulan dan untuk itu PENJUAL tidak dikenakan denda.

7.2.2. PENJUAL harus memberitahukan PEMBELI secara tertulis mengenai kejadian tersebut di atas tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak kejadian, perkiraan lamanya dan perpanjangan waktu yang diperlukan. Apabila terjadi sesuatu di luar keadaan yang disebut dalam Pasal 7.2.1, PENJUAL akan memberitahukan kepada PEMBELI untuk mendapat persetujuan guna melaksanakan keadaan kahar. Bila terjadi keadaan kahar lebih dari 4 (empat) bulan, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan cara-cara untuk menghentikan KONTRAK ini seluruhnya atau sebagian sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan menurut ketentuan Pasal 11, atau mengadakan negosiasi ulang yang disetujui bersama oleh pihak PEMBELI dan PENJUAL.

PASAL 8

WARRANTY

8.1. MATERIIL KONTRAK akan dikirim dalam kondisi baik dan siap dipakai, serta dilengkapi dengan *Certificate of Conformity (CoC) / Certificate of Compliance (COC) / Airworthiness Review Certificate (ARC), atau Certificate of Manufacture (CoM) atau Certificate of Origin (CoO).*

8.2. PENJUAL harus menyerahkan MATERIIL KONTRAK seperti tersebut dalam Pasal 2. pada KONTRAK ini dan sesuai dengan rincian dan SPESIFIKASI TEKNIS yang tercantum dalam Lampiran "C".

8.3. Sepanjang MATERIIL KONTRAK digunakan/dioperasikan serta dirawat oleh PEMBELI sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti semua instruksi-instruksi pengoperasian serta perawatan yang dikeluarkan oleh PENJUAL dan/atau instansi yang berwenang untuk itu, maka PENJUAL menjamin bahwa MATERIIL KONTRAK bebas dari:

8.3.1. Cacat dalam material dan mutu pekerjaan.

8.3.2. Kerusakan yang ditimbulkan oleh seleksi material yang salah.

8.3.3. Kerusakan karena desain yang salah.

8.3.4. Kerusakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

8.3.5. Kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersembunyi.

8.4. Apabila MATERIIL KONTRAK yang diterima mengalami kerusakan pada jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 600 (enam ratus) jam terbang mana yang tercapai

PEMBELI	PENJUAL

terlebih dahulu untuk barang kondisi *New*, dari tanggal penerbitan BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL, maka PENJUAL akan memperbaiki dan/atau mengganti dengan ketentuan bahwa materiil tersebut digunakan dan dirawat secara normal sesuai prosedur (publikasi teknis atau instruksi tertulis lain yang dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh PENJUAL atau pabrikan), tidak dirusakkan atau diubah tanpa izin PENJUAL atau akibat dari kecelakaan. PEMBELI akan memberitahukan secara tertulis ke PENJUAL dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah kerusakan ditemukan. PENJUAL bertanggung jawab untuk semua biaya penggantian termasuk biaya pengiriman untuk MATERIIL KONTRAK yang rusak tersebut.

8.5. Kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan oleh keausan karena penggunaan normal, kesalahan penggunaan, kelalaian berbagai pihak selain PENJUAL, kecelakaan atau kesalahan penerapan, atau perubahan yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu.

8.6. *Warranty* ini hanya berlaku terhadap PEMBELI dan tidak dapat dipindah-tangankan kecuali berdasarkan atas kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

8.7. Bila terdapat MATERIIL KONTRAK yang diperbaiki dan/atau diganti berdasarkan *warranty* ini, maka masa *warranty* tersebut berhenti dan akan berlanjut sesuai sisa waktu *warranty* yang masih berlaku setelah barang yang diperbaiki dan/atau diganti diterima kembali di Satuan PENGGUNA.

8.8. MATERIIL KONTRAK yang dilaksanakan perbaikan dan/atau penggantian sebagai akibat dari *claim warranty* dari PEMBELI harus kembali ke gudang penerimaan yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak IP (Instruksi Pengeluaran) dikeluarkan dari Dismatau. Dan apabila penyelesaian *Warranty Claim* melebihi 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya dokumen Instruksi Pengeluaran (IP) oleh PENJUAL maka PENJUAL akan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian *Warranty Claim* yang nilainya sebesar 1‰ (satu permil) dari harga barang *warranty claim* yang terlambat, untuk setiap hari keterlambatan.

8.9. Selama masa perbaikan dan/atau penggantian MATERIIL KONTRAK di fasilitas PENJUAL maka kalender jaminan dari MATERIIL KONTRAK yang bersangkutan akan dihentikan, sesuai laporan kerusakan yang dikeluarkan oleh Satuan PENGGUNA dan akan dilanjutkan setelah barang yang telah selesai diperbaiki dan/atau diganti diterima kembali oleh PEMBELI yang akan dibuktikan dengan *Delivery Document* berupa IP (Instruksi Pengeluaran) oleh Dismatau.

PASAL 9

HAK PATEN, HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN

9.1. Semua gambar teknik, deskripsi teknik dan dokumen lain yang diberikan *Manufacturer/Principal* atau yang berkenaan dengan KONTRAK berada di bawah lindungan hak cipta *Manufacturer/Principal*.

PEMBELI	PENJUAL

9.2. PEMBELI harus menyimpan kerahasiaan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PENJUAL tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga setiap dokumen atau informasi yang bersifat komersil ataupun teknis dari PENJUAL sesuai dengan KONTRAK maupun dalam penggunaan dan pemeliharaan MATERIIL KONTRAK.

9.3. PEMBELI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PENJUAL, tidak akan meniru atau memungkinkan pihak-pihak lain meniru atau mencontoh MATERIIL KONTRAK.

9.4. Data militer, informasi teknis dan operasional (laporan, gambar, cetak biru dan data lainnya) yang disediakan PEMBELI kepada PENJUAL sesuai KONTRAK ini tidak boleh dibocorkan oleh PENJUAL kepada pihak ketiga.

9.5. PENJUAL menjamin akan memenuhi seluruh tingkat pengamanan dan perlindungan yang berkaitan dengan tiap informasi rahasia yang diberikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL.

9.6. PENJUAL menanggung segala biaya dan bertanggung jawab atas kesulitan-kesulitan yang dapat timbul akibat tuntutan-tuntutan hak paten oleh pihak ketiga atas MATERIIL KONTRAK yang akan diserahkan, kecuali terhadap tuntutan disebabkan karena PEMBELI menggunakan MATERIIL KONTRAK atau secara langsung menggunakan MATERIIL KONTRAK yang dikombinasikan dengan produk lain.

PASAL 10

PERSELISIHAN

10.1. Apabila timbul perselisihan atau ketidaksepakatan antara kedua pihak dalam menafsirkan arti dan pelaksanaan KONTRAK ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk merundingkan penyelesaiannya.

10.2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10.1 tidak berhasil maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan di LKPP, Jakarta. Hasil keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

PASAL 11

PEMUTUSAN KONTRAK

11.1 PEMBELI berhak untuk memutuskan KONTRAK secara sepihak apabila:

PEMBELI	PENJUAL

11.1.1. Keterlambatan penyerahan MATERIIL KONTRAK melebihi 50 (lima puluh) hari dari waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.2.

11.1.2. Berlangsungnya keadaan kahar lebih dari 4 (empat) bulan.

11.1.3. PENJUAL tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KONTRAK.

11.1.4. PENJUAL dinyatakan pailit atau dicabut ijin usahanya oleh pihak berwenang baik karena perkara perdata atau pidana.

11.1.5. Adanya pembatalan/pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan terkait kegiatan ini.

11.2. Apabila terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh sesuai Pasal 11.1.1., Pasal 11.1.3, dan Pasal 11.1.4 maka PENJUAL akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

11.2.1. JAMINAN PELAKSANAAN menjadi milik Negara.

11.2.2. PENJUAL dimasukan dalam *Black List*.

11.3. PENJUAL berhak menunda pelaksanaan dan selanjutnya memutuskan KONTRAK apabila PEMBELI gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam KONTRAK.

11.4. Apabila KONTRAK diputuskan karena alasan pada Pasal 11.2., maka PENJUAL menyetujui untuk mengganti kepada PEMBELI biaya-biaya Bank yang telah dikeluarkan sehubungan pemutusan itu, ditambah denda yang ditetapkan pada Pasal 7.1. dan JAMINAN PELAKSANAAN menjadi milik Negara.

11.5. Tidak ada denda atau pengembalian biaya Bank yang akan dibayarkan oleh PENJUAL sebagai akibat dari pemutusan sesuai Pasal 11.1.2. dan 11.1.5.

PASAL 12

JAMINAN PELAKSANAAN

12.1. Sebelum tanda tangan KONTRAK, PENJUAL harus menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN minimal sebesar 5% (lima persen) dari TOTAL HARGA KONTRAK atau senilai Rp 673.107.450,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah). JAMINAN PELAKSANAAN tersebut harus dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia.

12.2. JAMINAN PELAKSANAAN berlaku juga sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN yang berlaku sampai dengan 21 (dua puluh satu) bulan setelah tandatangan Kontrak.

PEMBELI	PENJUAL

12.3. Dalam hal PENJUAL gagal memenuhi kewajiban KONTRAK tanpa suatu alasan yang dapat diterima atau pemberitahuan dari PENJUAL, maka JAMINAN PELAKSANAAN tersebut menjadi milik Negara.

12.4. JAMINAN PELAKSANAAN tersebut pada Pasal 12.1. di atas akan diserahkan kembali oleh PEMBELI kepada PENJUAL dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa *warranty* berakhir.

PASAL 13

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL, KODIFIKASI DAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN

13.1. PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK.

13.1.1. Sebelum penyerahan MATERIIL KONTRAK, Tim Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK yang bertindak untuk dan atas nama PEMBELI melaksanakan Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK selama 3 (tiga) hari di fasilitas PENGGUNA.

13.1.2. Pemeriksaan dan Penerimaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur standar pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL sesuai dengan format pada Lampiran "F-5". BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL akan menjadi salah satu syarat penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR sesuai dengan format pada Lampiran "F-6" yang ditandatangani oleh PEMBELI.

13.1.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penerimaan secara administrasi melalui Gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Gudang Pusbekmatau, secara fisik di fasilitas PENGGUNA dengan MATERIIL KONTRAK yang sudah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap oleh PENGGUNA. MATERIIL KONTRAK yang diterima secara fisik harus sesuai dengan dokumen hasil pemeriksaan dan penerimaan serta sesuai dengan Lampiran A dan C.

13.1.2.2. Tim Pemeriksaan dan Penerimaan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari:

13.1.2.2.1. Panitia sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 2 (dua) orang Kemhan dan 5 (lima) orang dari TNI AU.

13.1.2.2.2. Pendukung sebanyak 3 (tiga) orang dari Pusbekmatau termasuk personel BMN TNI AU.

13.1.2.3. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis peralatan

PEMBELI	PENJUAL

sesuai KONTRAK atau terjadi kerusakan terhadap MATERIIL KONTRAK, kekurangan, cacat dan lain sebagainya, maka PENJUAL wajib memperbaiki dan/atau mengganti MATERIIL KONTRAK tersebut sesuai Pasal 6.4.

13.1.2.4. Seluruh kegiatan Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK menjadi tanggung jawab PENJUAL.

13.2. KODIFIKASI

13.2.1. MATERIIL KONTRAK yang tercantum pada Pasal 2 terkodifikasi system NSN (Nomor Sediaan Nasional).

13.2.2. Setelah efektif KONTRAK, PENJUAL wajib menyerahkan dokumen data dukung kodifikasi kepada Kabaranahan Kemhan u.p. Kapuskod Baranahan Kemhan sesuai Lampiran "G". PEMBELI untuk keperluan proses kodifikasi Sistem NSN sebagai prosedur kodifikasi.

13.2.3. Dokumen data dukung tersebut sebagai dasar penerbitan Berita Acara Kodifikasi oleh Tim Kodifikasi Puskod Baranahan Kemhan.

13.2.4. PENJUAL wajib mengajukan permohonan kodifikasi kepada Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk MATERIIL KONTRAK yang belum memiliki kode NSN dan hasilnya disampaikan kepada PEMBELI.

13.2.5. Guna kepentingan Sistem Kodifikasi NSN Baranahan Kemhan, PENJUAL harus menyerahkan data MATERIIL KONTRAK disertakan dengan kode yang ditetapkan oleh Badan Kodifikasi Nasional atau *National Codification Bureau* (NCB) dari negara produsen dan dilengkapi dengan data-data sebagai berikut:

13.2.5.1. Nama Materiil.

13.2.5.2. Part Number dan Serial Number.

13.2.5.3. Nama Pabrikan Pemasok.

13.2.5.4. Karakteristik/Spesifikasi Teknis Materiil.

13.2.5.5. Illustrated Part Catalog/Illustrated Part Breakdown.

13.2.5.6. Gambar Teknis.

13.2.6. BERITA ACARA KODIFIKASI diterbitkan oleh Puskod Baranahan Kemhan dan diserahkan kepada PEMBELI untuk diteruskan kepada PENGGUNA.

13.2.7. Seluruh kegiatan kodifikasi menjadi tanggung jawab PENJUAL.

PEMBELI	PENJUAL

13.3. SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN

13.3.1. MATERIIL KONTRAK sesuai yang ditentukan pada Pasal 2. harus memiliki SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan, sesuai dengan format pada lampiran "F-1".

13.3.2. Sertifikasi Kelaikan Pertahanan dilaksanakan untuk kegiatan reviu dokumen dan kegiatan *conformity* di fasilitas PENGGUNA dengan jumlah personel 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) hari.

13.3.3. SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan adalah hasil reviu dokumen dan *conformity* yang dilaksanakan terhadap item kontrak yang berada dalam *Scope of Work*.

13.3.4. PENJUAL akan memberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan.

13.3.5. Seluruh kegiatan tim kelaikan untuk melaksanakan verifikasi kelaikan MATERIIL KONTRAK tersebut menjadi tanggung jawab PENJUAL.

13.3.6. SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN diterbitkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan setelah Materiil Kontrak diterima dan berfungsi baik sesuai dengan spesifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan pada sub pasal 13.3.2.

13.3.7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN belum diterbitkan karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran dapat dilaksanakan tanpa SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN.

PASAL 14

AMANDEMEN

14.1. Perubahan terhadap KONTRAK ini hanya boleh dibuat berdasarkan persetujuan tertulis antara PARA PIHAK dan dituangkan dalam Amandemen KONTRAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK.

14.2. Setiap amandemen atau modifikasi terhadap KONTRAK ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang antara PENJUAL dan PEMBELI.

14.3. Apabila PEMBELI belum menyetujui perubahan atas KONTRAK secara tertulis akan tetapi PENJUAL tetap melaksanakannya, maka segala akibat dari

PEMBELI	PENJUAL

pelaksanaan kerja tambah dan kurang ini menjadi tanggungan PENJUAL dan PENJUAL tidak berhak menuntut pembayaran apapun kepada PEMBELI.

14.4. Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Baranahan Kemhan adalah Pejabat yang berwenang menandatangani Amandemen Kontrak.

PASAL 15

HAL LAIN-LAIN

15.1. Hak dan kewajiban berdasarkan KONTRAK ini tidak dapat dipindahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan PARA PIHAK.

15.2. Semua biaya yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan KONTRAK yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PENJUAL akan dibebankan kepada PENJUAL.

15.3. Segala sesuatu yang timbul dan belum tercantum dalam KONTRAK ini serta dinamika yang terjadi dalam proses pengadaan akan disikapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15.4. Untuk ketertiban dalam penatausahaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu, PENJUAL menyerahkan MATERIIL KONTRAK yang harus dilengkapi dengan data:

15.4.1. Daftar MATERIIL KONTRAK yang harus dilengkapi dengan kode penggolongan barang sesuai dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu.

15.4.2. Hasil input MATERIIL KONTRAK oleh Operator SAKTI.

15.4.3. Hasil input transfer keluar MATERIIL KONTRAK oleh Operator SAKTI.

15.4.4 Hasil input transfer masuk MATERIIL KONTRAK oleh PENGGUNA.

PASAL 16

PEMENUHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PENGADAAN

16.1. PENJUAL akan memenuhi kewajiban TKDN Pengadaan dalam pekerjaan materiil kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.

16.2. Sebelum penyerahan MATERIIL KONTRAK, PEMBELI akan melaksanakan penilaian TKDN oleh Tim Penilaian TKDN Pengadaan sebanyak 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Verifikator TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin, selama 2 (dua) hari.

PEMBELI	PENJUAL

16.3. Tim Penilaian TKDN bertugas untuk melaksanakan kegiatan Perhitungan capaian TKDN kontrak pengadaan sebelum SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR.

16.4. Semua kegiatan Tim Penilaian TKDN Pengadaan tersebut menjadi tanggung jawab PENJUAL.

16.5. Hasil Penilaian TKDN Pengadaan dituangkan dalam BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CAPAIAN NILAI TKDN sesuai dengan format lampiran "F-2".

PASAL 17

EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK

17.1. KONTRAK ini mulai berlaku efektif apabila KONTRAK telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

17.2. KONTRAK ini akan berakhir apabila semua hak dan kewajiban dari PARA PIHAK telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam KONTRAK.

PEMBELI	PENJUAL

PASAL 18

TANDA TANGAN

KONTRAK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) dokumen asli, satu untuk PEMBELI dan lainnya untuk PENJUAL, mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat, sebanyak 10 (sepuluh) copy akan dibuat untuk PEMBELI.

Jakarta, 14 Maret 2025

PEMBELI
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Diwakili oleh:

Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

[redacted]

Yustan Lubis, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

PENJUAL

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA

Diwakili oleh:

Direktur,

Willianto

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "A"

URAIAN MATERIIL KONTRAK DAN HARGA
PENGADAAN SUKU CADANG AWP TCI/KRITIS PESAWAT T-50I
PAKET 8 TNI AU

PEMBELI	PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

URAIAN HARGA DAN MATERIIL KONTRAK
PENGADAAN SUKU CADANG AWP TCI/KRITIS PESAWAT T-50I PAKET 8
TNI AU

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	QTY	SATUAN	KONDISI	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AIR CYCLE MACHINE	826729-2 / 85VY000113-013	1	EA	NEW	Rp12.916.121.000,00	Rp 12.916.121.000,00
2	VALVE, NEGATIVE PRESSURE, RELIEF	60840-3	1	EA	NEW	Rp 546.028.000,00	Rp 546.028.000,00
	TOTAL						Rp13.462.149.000,00
	Terbilang : tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah						

PEMBELI	PENJUAL
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	PT. Jadi Sukses Dirgantara
Diwakili oleh:	Diwakili oleh:
Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,	Direktur
[redacted]	
Yusran Lubis, S.E., M.M. Marsekal Pertama TNI	Willianto

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "B"

SURAT PENAWARAN

PEMBELI	PENJUAL

Nomor : 211-25/SPTH/JSD/2025
Lampiran :
Perihal : Penawaran Teknis dan Harga

Kepada

Yth. TIM POKJA PENGADAAN SUKU CADANG AWP/TCI/KRITIS PESAWAT T-50I PAKET 8 TA 2025
PUS ALPALHAN BARANAHAN KEMHAN
GD. A.H. NASUTION LT. XI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 13-14

di

Jakarta Pusat 10110

1. Sehubungan dengan Surat Tim Pokja Pengadaan Nomor : B/1126/SAR.00.02.01/BRN tanggal 14 Januari 2025, dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi, Teknis dan Harga untuk pekerjaan Pengadaan Suku Cadang AWP/TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 8 Ta 2025.

2. Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga ini sudah memperhitungkan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

   a. Harga barang sebesar Rp. 13.462.149.000,00
   Terbilang : (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

   b. Masa berlaku penawaran selama 3 (tiga) bulan sejak pembukaan penawaran.

   c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan.

   d. Masa *Warranty* :
   Kondisi *NEW* selama 12 (dua belas) bulan / 600 (enam ratus) jam terbang

3. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan:

   a. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan).

   b. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada).

PEMBELI	PENJUAL

c. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :

1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (dapat disertai brosur dan gambar-gambar pendukung).

2) Identitas (jenis, tipe dan merk) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.

3) Sertifikat-sertifikat (sesuai yang dipersyaratkan).

d. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN apabila ada).

4. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "Asli" dan "Rekaman".

5. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 15 Januari 2025

Hormat kami,

WILIANTO
DIREKTUR

PEMBELI	PENJUAL

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN SUKU CADANG AWP/TC/KRITIS PESAWAT T-401 PAKET II TA 2025

A	Material							
NO	NAMA BARANG	KODIFIKASI BARANG	BANYAKNYA		Kondisi	Harga (Rp.)		Ket.
			Jumlah	Satuan		Satuan	Jumlah	
1	AIR CYCLE MACHINE	820729-2 / 815V000113-013	1	EA	NEW	12.916.121.000,00	12.916.121.000,00	
2	VALVE, NEGATIVE PRESSURE RELIEF	60940-3	1	EA	NEW	546.028.000,00	546.028.000,00	
					Jumlah		13.462.149.000,00	

B	INSTALASI		
1	Tempat	-	
2	Waktu	-	
3	Jumlah Personel	-	
4	Hasil	-	
C	UJI FUNGSI		
1	Tempat	-	
2	Waktu	-	
3	Jumlah Personel	-	
4	Hasil	-	
D	PELATIHAN		
1	Tempat	-	
2	Waktu	-	
3	Jumlah Personel	-	
4	Hasil	-	
	Total A + B + C + D	Rp	13.462.149.000,00 (Terbilang: Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

PT. Jadi Sukses Dirgantara

Direktur

PT. JADI SUKSES DIRGANTARA
The City Tower Level 12 Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81
Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia
021-29557270

PEMBELI	PENJUAL

BNI

B 501967

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. GB7UKO01TPRB25

Yang bertanda tangan di bawah ini: Willy Patruawan, dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Tanjung Priok PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Samping Stasiun No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Tim Pokja
Alamat : Gedung A.H. Nasution Lt. XI Ruang 1115 Pus Alpalhan Baranahan Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta 10110

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 136.910.142,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang AWP/TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 8 Program Modernisasi Alutista, Non Alutista dan Sarpras Pertahanan TA 2025 berdasarkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Nomor : B/1126/SAR.00.02.01/BRN tanggal 14 Januari 2025, apabila:

Nama : PT. Jadi Sukses Digantara
Alamat : The City Tower Lantai 12 Unit 1N Jl MH. Thamrin Nomor 81 RT/RW 013/006, Kel Menteng, Kec Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menawarkan harga yang sesungguhnya, Menawarkan harga tersebut tidak pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undangan pemasukan penawaran harga , atau
b. Mengundurkan diri dari seleksi pemilihan sebelum ditetapkan pemenang akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam tata cara pemasukan dokumen penawaran.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 3 (tiga) bulan, dari tanggal 15 Januari 2025 s.d 15 April 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan dianjurkan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjung Priok
Jl. Samping Stasiun No. 1 Tanjung Priok
Jakarta Utara
No. Telp. 021-43951891
No. Fax. 021-43952570

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2025
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjung Priok

Willy Patruawan
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

IDR 136,910,142.00

Garansi Bank - Model TT-PBT

PEMBELI	PENJUAL

Curtin Aero Tech Pte. Ltd

LETTER OF APPOINTMENT

We, Curtin Aero Tech Pte. Ltd, with it registered address at : 101 Cecil Street #11-04, Singapore 069533, hereby authorize,

PT. Jadi Sukses Dirgantara
The City Tower, Level 12 – 1N,
Jl. MH. Thamrin No.81 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia 10310

As our agent for supply, support, repair, upgrade and reconditioning of aircraft spares components, avionics system, engines, ground / station / mobile for Active/Passive Radar systems/components to ***Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia***, under the scope of below capabilities of Aircrafts :

CADPAD, FIREX, SQUIB, Ejector Parts, M-2, M-39 Components, M-61 Spare Parts, CBLS, SUU 20/25, MAU 45/50, ARD 863, Tires, Brakes & Wheels, Avionics, Instruments, Batteries, Engine Component & Ground Supports Equipment's (GSE), Tools, Radar, Ammunition (Small, Medium, Large Caliber), Motor Rocket Mk4, MK68, Bomb MK Series, Warhead, All type of Aircraft Bomb / Weapon System, Electrical, Test Equipment's / Bench Test / Tester / Test Set, Slamchangja, Serban / Ground Support Equipment (GSE) and related to aircraft equipment's for below: -

AIRCRAFTS C130A/B/H, SUKHOI 27/30, F16A/B/C/D, BOEING 737-200/400/500, FOKKER 28, HAWK 100/200, PUMA, SUPER PUMA, COLIBRI EC-120B,T-34C, EMB-314 SUPER TUCANO, TS10 GOLDEN EAGLE , KT1B, CN235, CN295,C212, BELL 476, AGUSTA WESTLAND AW101, R172/182T CESSNA, T-41D CESSNA, AIRBUS LIGHT HELICOPTER, EC-725, GROB G120TP-A, BELL 412, MI 17VS, MI 35P, HUGHES 300, CASA 212-200, COLIBRI, FENNEC, BO 105, UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV), BEECHCRAFT PREMIER 1

And

MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL (MRO) OF ALL AIRCRAFT COMPONENTS
(Avionics, Instruments, Hydraulic, Engine/Engine components/Accessories, Mechanical, Propeller, Starter Generator, Gear Box, Radar, Rotor, Servo, Electronics, Etc.), GROUND / STATION / MOBILE FOR ACTIVE/PASSIVE RADAR, AIR DEFENSE SYSTEMS AND MODERN ELECTRONIC WARFARE EQUIPMENTS

This Letter of Appointment is valid for period of two (2) years with effect from 10th August 2024 until 10th August 2026. After this date, it can be prolonged upon mutual agreement.

Signed by :

Anastasia K.
Director
Curtin Aero Tech Pte. Ltd

Signed by :

Williamto
Director
PT. Jadi Sukses Dirgantara

With presence of,

NOTARY PUBLIC
Sumbi M Manon
SINGAPORE

Mengetahui
Asas Pertahanan

Ahmad Zaki
SH., MKn
Jl. Cipinang Besar Utara No. 23D
Jakarta Timur 13240
Tel: (021) 8380 3995
Email: info@notarysingapore.sg
25 JUL 2024

101 Cecil Street #11-04
Singapore 069533
Singapore

PEMBELI	PENJUAL

Curtin Aero Tech Pte. Ltd

POWER OF ATTORNEY

We, Curtin Aero Tech Pte. Ltd, with it registered address at : 101 Cecil Street #11-04, Singapore 069533, hereby appoint :

Mr. Willianto
PT. Jadi Sukses Dirgantara
The City Tower, Level 12 – 1N,
Jl. MH. Thamrin No.81 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia 10310

Who is our authorized representative for **Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia**, to negotiate and sign contract on our behalf for the sales of spare parts and repair / overhaul components (as stated in the Letter of Appointment) of aircraft to Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia.

This Power of Attorney will become effective on 10th August 2024 and will be terminate 10th August 2026. After this date, it can be prolonged upon mutual agreement.

Signed by:

Anastasia K.
Director
Curtin Aero Tech Pte. Ltd

Signed by:

Willianto
Director
PT. Jadi Sukses Dirgantara

With presence of,

NOTARY PUBLIC
Sumitri M Menon
SINGAPORE

51A UPPER WELD ROAD
SINGAPORE 207408
TEL: (65) 6392 3955
EM: info@notarysingapore.sg

25 JUL 2024

Nomor 172/KMI POPHAU 2024
Tanggal 29 Juli 2024

Mengetahui
Atase Pertahanan RI

Achmad Zailani
Mayjen Pol Nrp 526026

101 Cecil Street #11-04
Singapore 069533
Singapore

PEMBELI	PENJUAL

Three Stars Aerospace LLC

Three Stars Aerospace LLC
[illegible] S. White Road,
Suite 201
Cupertino, CA [illegible], USA

ORIGINAL

REF 20240[illegible]

Letter of Support

August 23rd, 2024

To whom it may concern,

This letter confirms Three Stars Aerospace, LLC will be supporting the following company:

CURTIN AERO TECH PTE. LTD.
101 CECIL STREET #11-04
SINGAPORE - 069533

As an approved vendor to End-Use Indonesian Army, Indonesia Air Force, Indonesia Defense Force, Three Stars Aerospace, LLC will support and supply for most aircraft, and tools, including:

CADPAD, FIREX, SQUIB, Restore Parts, M-2, M-39 Components, M-61 Spare Parts, CBLS, SUU 20/25, MAU 45/50, ARD 863, Tires, Brakes & Wheels, Avionics, Instruments, Batteries, Aircraft Components, Engine Component & Ground Supports Equipment Tools, Radar, Ammunition (Small, Medium, Large Caliber), Motor Rocket M84, MK66, Bomb MK Series, Warhead and All type of Aircraft Bomb, Electrical, Test Equipment's / Bench Test

Related to aircraft equipment as below:

AIRCRAFTS C130A/B/H, BONNOI 27/30, F16A/B/C/D, BOEING 737-200/400/500, FOKKER 28, HAWK 100/200, PUMA, SUPER PUMA, COLIBRI EC-120B,T-34C, EMB-314 SUPER TUCANO, T501 GOLDEN EAGLE , KT1B, CN235, CN295, C212, BELL 470, AGUSTA WESTLAND AW101, R172/182T CESSNA, T-41D CESSNA, AIRBUS LIGHT HELICOPTER, EC-725, GROB G120TP-A, BELL 412, MI 17V5, MI 35P, HUGHES 300, CASA 212-200, COLIBRI, FENNEC, BO 105, BEECHCRAFT PREMIER 1

Including **MAINTENANCE, REPAIR** AND **OVERHAUL** (MRO) OF ALL AIRCRAFT COMPONENTS (Avionics, Instruments, Hydraulic, Engine/ Engine components/Accessories, Mechanical, Propeller, Starter Generator, Gear Box, Radar, Rotor, Servo, Electronics, Etc.)

Sincerely,

Jean. K
Director

SEE ATTACHED FOR NOTARY CERTIFICATE

PEMBELI	PENJUAL

JURAT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of Merced

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29 day of August,

20 24 by Jean Khosalim

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Signature (Seal)

OPTIONAL INFORMATION

DESCRIPTION OF THE ATTACHED DOCUMENT

Letter of support

(Title or description of attached document)

(Title or description of attached document continued)

Number of Pages 1 Document Date 8/23/24

Additional information

INSTRUCTIONS

The wording of all Jurats completed in California after January 1, 2015 must be in the form as set forth within this Jurat. There are no exceptions. If a Jurat to be completed does not follow this form, the notary must correct the verbiage by using a jurat stamp containing the correct wording or attaching a separate jurat form such as this one with does contain the proper wording. In addition, the notary must require an oath or affirmation from the document signer regarding the truthfulness of the contents of the document. The document must be signed AFTER the oath or affirmation. If the document was previously signed, it must be re-signed in front of the notary public during the jurat process.

- State and county information must be the state and county where the document signer(s) personally appeared before the notary public.
- Date of notarization must be the date the signer(s) personally appeared which must also be the same date the jurat process is completed.
- Print the name(s) of the document signer(s) who personally appear at the time of notarization.
- Signature of the notary public must match the signature on file with the office of the county clerk.
- The notary seal impression must be clear and photographically reproducible. Impression must not cover text or lines. If seal impression smudges, re-seal if a sufficient area permits, otherwise complete a different jurat form.
  - Additional information is not required but could help to ensure this jurat is not misused or attached to a different document.
  - Indicate title or type of attached document, number of pages and date.
- Securely attach this document to the signed document with a staple.

PEMBELI	PENJUAL

FORMULIR PERNYATAAN KOMITMEN TKDN
PENGADAAN GABUNGAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Willianto
- Jabatan : Direktur
- Bertindak untuk dan atas nama : PT. Jadi Sukses Dirgantara
- Perusahaan : PT. Jadi Sukses Dirgantara
- Alamat : Gedung The City Tower, Level 12-1N, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, INDONESIA
- Telepon : 021-29557270
- Email : willianto.xu@yahoo.com

REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN

Uraian Pekerjaan	Biaya Gabungan Barang dan Jasa*) (Rupiah)			
	KDN	KLN	TOTAL Biaya	% KDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang				
1 Material Langsung	-	13.291.649.000	13.291.649.000	0.00%
Jasa				
2 Jasa Umum	170.500.000	-	170.500.000	1.27%
C. TOTAL Biaya (A + B)	170.500.000	13.291.649.000	13.462.149.000	1.27%

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 15 Januari 2025
PT. Jadi Sukses Dirgantara

Willianto
Direktur

Verifikator TKDN

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "C"

SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBELI		PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

SPESIFIKASI TEKNIK
PENGADAAN SUKU CADANG AWP TCI/KRITIS PESAWAT T-50I PAKET 8
TNI AU

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	QTY	SATUAN	KONDISI	REFERENSI
1	2	3	4	5	6	7
1	AIR CYCLE MACHINE	828729-2 / 85VY000113-013	1	EA	NEW	ID1T-50A-4-21
2	VALVE, NEGATIVE PRESSURE, RELIEF	60840-3	1	EA	NEW	ID1T-50A-4-28

Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yusran Lubis, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

PEMBELI		PENJUAL

LAMPIRAN "D"

GAMBAR-GAMBAR/BROSUR

PEMBELI	PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

GAMBAR-GAMBAR/BROSUR
PENGADAAN SUKU CADANG AWP TCI/KRITIS PESAWAT T-50I PAKET 8
TNI AU

No	NAMA BARANG	PART NUMBER	GAMBAR
1	AIR CYCLE MACHINE	828729-2 Alt. 85VY000113-013	
2	VALVE, NEGATIVE PRESSURE, RELIEF	60840-3	

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "E"

JAMINAN PELAKSANAAN

PEMBELI	PENJUAL

FORMAT
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

Yang bertandatangan dibawah ini.....
.....PT. Bank.....jalan.....ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank.....berkedudukan dan berkantor pusat di....., dengan alamat Jalan ..... untuk selanjutnya disebut.....
.....PENJAMIN.....
Dengan ini mengingat dan untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJUAL yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setaip saat kepada.....
.....PEMENGANG JAMINAN.....
Sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.....
.....
Atas dasar tentutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam garansi Bank ini, apabila:
Nama:.....
Alamat:.....
Berkedudukan di.....

Selanjutnya disebut:.....
.....YANG DIJAMIN.....
Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya garansi bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibanya kepada PEMENGANG JAMINAN berupa: Pengadaan ..... Sebagaimana ditentukan dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan materiil antara PEMENGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal.....nomor:.....yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.....
Garansi Bank ini berlaku untuk.....bulan terhitung sejak.....sampai dengan tanggal.....
Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya ..... hari setelah tanggal berakhirnya garansi Bank atau paling lambat pada tanggal.....

Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas garansi Bank ini.....

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hokum yang tepat dan umum dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri .....

Garansi bank ini dikeluarkan pada tanggal.....

PT. Bank.....
Kantor Cabang.....

ttd

Pimpinan Bank.....

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F"

BENTUK-BENTUK BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-1"

BENTUK SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-1"
BENTUK SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIS JENDERAL

SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN

No. : SERT/ / / /2025

1. Kepala Pusat Kelaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa ..... tersebut di bawah ini:

   Tipe :

   Nomor Seri :

   Katagori :

   Pembuat :

   telah memenuhi persyaratan kelaikan udara militer berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Nomor :

2. Sertifikat Kelaikan Udara Militer ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Jakarta,

Kepala Pusat Kelaikan,

.....

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-2"

BENTUK BERITA ACARA HASIL CAPAIAN NILAI TKDN

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-2"
BENTUK BERITA ACARA HASIL
CAPAIAN NILAI TKDN

BERITA ACARA
TENTANG

HASIL VERIFIKASI CAPAIAN
NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

PENGADAAN .....

NOMOR: BA/..... /...../2025

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Hasil Verifikasi/*Self Assessment**) atas capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk:

Nomor Kontrak : TRAK/....., tanggal 2025

Nama KOntrak : Pengadaan .....

Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang/Jasa/Gabungan Barang dan Jasa*)

Capaian TKDN : ..... %

Perusahaan : PT .....

Alamat : .....

*) Pilih sebagaimana yang dilaksanakan sebagai lampiran

Jakarta, ... 2025

Ses Baranahan Kemhan
Selaku Kordinator Tim Pelaksana Verifikasi TKDN,

.....

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-3"

BENTUK BERITA ACARA KODIFIKASI SISTEM NSN

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-3"
BENTUK BERITA ACARA KODIFIKASI SISTEM NSN

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Kodifikasi Materiil Sistem NSN Pengadaan ..... terdiri dari:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
1)	.....	.....	Ketua Tim
2)	.....	.....	Anggota
3)	.....	.....	Anggota

2. Telah ditunjuk sebagai Tim Kodifikasi Materiil untuk melaksanakan kegiatan kodifikasi materiil berdasarkan:

   a. Surat Perintah Kabaranahan Kemhan Nomor: SPRIN/...../...../202XX tanggal .....20XX tentang penunjukan Tim Kodifikasi Materiil.

   b. Kontrak Jual Beli antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan PT. ..... Nomor: TRAK/ ..... / ..... / 20XX/ ..... tanggal ..... 20XX tentang Pengadaan .....

Sehubungan dengan dasar di atas, berikut hasil kodifikasi materiil Sistem NSN yang telah ditetapkan oleh Puskod Baranahan Kemhan untuk Pengadaan .....

Nama Materiil : .....
Part Number : .....
Kode NSN : .....

Hasil data kodifikasi terlampir.

PEMBELI	PENJUAL

3. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani oleh Tim Kodisfikasi Puskod Baranahan Kemhan dan Penyedia Materiil untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 20XX

Penyedia Materiil, PT.	Nama/Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP	Tanda tangan
	1. Nama Pangkat/Korp/NRP/NIP	.....
	2. Nama Pangkat/Korp/NRP/NIP	.....
	3. Nama Pangkat/Korp/NRP/NIP	.....

Mengetahui:

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Nama
Pangkat

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-4"

BENTUK SERTIFIKAT KODIFIKASI

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-4"
BENTUK SERTIFIKAT KODIFIKASI

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

DEFENCE FACILITY AGENCY MINISTRY OF DEFENCE
CODIFICATION CENTER

SERTIFIKAT KODIFIKASI
CERTIFICATE of CODIFICATION
Nomor : SK/...../...../ 20XX/PUSKOD

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertanahan Kementerian Pertahanan
Sebagai *National Codification Bureau (NCB)* Indonesia

Codification Center of Defense Facilities Agency of Ministry of Defence
As the National Codification Bureau (NCB) of Indonesia

Menetapkan
Certify

Nomor Sedian Nasioani (NSN)
National Stock Number (NSN)

Pengadaan .....

Berdasarkan Kontrak Pengadaan Nomor: TRAK/ ..... / ..... /..... /20XX/..... tanggal ..... 20XX tentang Pengadaan ..... yang dilaksanakan antara Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI dengan PT. ..... dengan Kode NCAGE .....

With reference to the Procurement Contract Number: TRAK/ ..... / ..... /..... /20XX/..... dated .....20XX conceming to the Procurement of ..... between Defence Facilities Agency pf Ministry of Defence of the Republic of Indonesia with PT. .....NCAGE Code .....

Sertifikat beserta Lampiran Data Kodifikasi Materill Sistem NSN ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

This Certificate and the Annex of the Codification Data of the NSN sheet is inseparable unit of the Certificate.

Jakarta, ... 20XX

Kepala Pusat Kodifikasi,
The Head of Codification Center
As
Director NCB of Indonesia

Name
Title

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-5"

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN

PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-5"
BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KESATUAN : BADAN SARANAHAN PERTAHANAN KEMHAN

GUDANG : MALUR SETBARANAHAN KEMHAN

DI : JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK

NOMOR :

Pemeriksaan materiil kontrak pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota

Telah ditunjuk sebagai Tim pemeriksa dan penerima materiil kontrak berdasarkan Surat Perintah Kabaranahan Kemhan Nomor : .....tanggal..... tahun ....

Untuk memeriksa materiil yang dimasukan digudang tersebut di atas berdasarkan:

1. Kontrak Jual Beli Nomor : ..... tanggal ..... tentang.....
2. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : .....tanggal .....tentang.....

Hasil pemeriksaan materiil adalah sebagai berikut :

NO	NAMA MATERIIL	SESUAI KONTRAK			DATANG	SISA /KNG	KONDISI		HARGA		KET
		SN	QTY	SAT			BAIK	TDK BAIK	SAT (RP)	DATANG (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Rp.....	
Terbilang : (.....)											

PEMBELI	PENJUAL

/ Materiil.....

Materiil tersebut di atas kami serahkan kepada Gudang ..... untuk selanjutnya akan dilaksanakan Pemasangan .....
.....

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Materiil Kontrak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 20...

TIM PEMERIKSAAN KEMHAN RI

Menyatakan menerima Barang kontrak dari Tim Pemeriksa Kemhan	Nama/Pangkat/Nrp/Nip	Tanda tangan
	1.	1. .....
	2.	2. .....
	3.	3. .....
....	4.	4. .....
	5.	5. ....
	6.	6. ....
	7.	7. ....

Mengetahui,

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
.....,

.....

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "F-6"

BENTUK SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR

PEMBELI	PENJUAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR

NOMOR KONTRAK : .....

TANGGAL : .....

ANTARA

BADAN SARANA PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

SEBAGAI PIHAK PERTAMA

dengan

DIREKTUR
.....

SEBAGAI PIHAK KEDUA

PADA HARI INI PIHAK PEMBELI MENYATAKAN BAHWA SELURUH MATERIIL KONTRAK BERUPA.....TELAH DITERIMA DALAM KEADAAN BAIK DAN LENGKAP SERTA SELURUH KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL TELAH TERPENUHI SESUAI KETENTUAN DALAM KONTRAK.

Jakarta, ... 2025

KEPALA BADAN SARANA PERTAHANAN,

.....

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "G"

KODIFIKASI

PEMBELI	PENJUAL

PROSEDUR KODIFIKASI

A. PERSIAPAN

1. Puskod Baranahan Kemhan menyiapkan personel/tim Kodifikasi sebanyak 5 orang (barang sederhana) atau 7 orang (barang kompleks) sesuai dengan kompleksitas materiil untuk melaksanakan kegiatan kodifikasi materiil kontrak.

2. Pelaksanaan proses kodifikasi sejak efektif kontrak sampai dengan materiil kontrak telah terkodifikasi.

3. PENJUAL mengirimkan surat permohonan proses kodifikasi materiil kontrak kepada Kabaranahan Kemhan up. Kapuskod Baranahan Kemhan.

4. Apabila diperlukan akan diadakan rapat koordinasi penentuan materiil yang akan dikodifikasi dan dokumen data dukung materiil yang diperlukan dengan mengundang Pengguna Barang.

5. PENJUAL menyiapkan data dukung sebagai berikut:

   - Nama Materiil
   - Part Number
   - Nama Pabrikan
   - Karakteristik/Spektek Materiil
   - Illustrated Part Catalog (IPC)/Illustrated Part Breakdown (IPB)
   - Gambar Teknis
   - Nomor Kontrak Jual Beli/Pengadaan
   - Negara Produsen

   Contoh format
   Materiil dalam negeri

NO	NAMA MATERIIL	PART NUMBER	KARAKTERISTIK SPEK MATERIIL	IPC/IPB	NAMA PABRIK & ALAMATNYA	GAMBAR MATERIIL
1	2	3	4	5	6	7
1	...	...	...	...	...	Masukan data
dst						

6. Produk dalam negeri yang menggunakan komponen dari luar negeri harus dilengkapi dengan NSN dari negara asal pabrikan, apabila diperlukan biaya dalam pengurusan NSN (*NATO Serial Number*) di NCB (*National Codification Bureau*) negara pabrikan ditanggung oleh PENJUAL. Puskod Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia dapat membantu berkoordinasi dengan NCB negara pabrikan.

PEMBELI	PENJUAL

B. PELAKSANAAN

1. PENJUAL menyerahkan dokumen data dukung materiil kontrak ke Kabaranahan Kemhan u.p. Kapuskod Baranahan Kemhan sesuai dengan hasil keputusan rapat koordinasi.

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen data dukung materiil kontrak Puskod Baranahan Kemhan yang diserahkan dari pihak PENJUAL.

3. BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DATA DUKUNG KODIFIKASI dapat diterbitkan apabila data dukung yang dikirimkan oleh PENJUAL telah dinyatakan lengkap dan PENJUAL membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi dokumen apabila terdapat kekurangan dan memfasilitasi proses kegiatan kodifikasi.

4. Sebelum proses kodifikasi terlebih dahulu dilaksanakan proses pemberian NCAGE (Kode Pabrik) oleh Puskod Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia kepada pabrikan/perusahaan yang belum memiliki.

5. Proses Kodifikasi

   a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen data dukung.

      1) Menerima kelengkapan dokumen data dukung yang dikirimkan oleh PENJUAL.
      2) Memeriksa kelengkapan dokumen data dukung yang telah diterima sesuai hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi penentuan materiil yang akan dikodifikasi.
      3) Membuat Berita Acara Penyerahan Dokumen Data Dukung kodifikasi yang menyatakan bahwa dokumen data dukung telah diserahkan dengan kondisi lengkap dan PENJUAL membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi dokumen data dukung apabila dalam proses kodifikasi terdapat kekurangan.

   b. Pemberian / penentuan nama baku (AIN).

      1) Memberikan nama baku pada materiil/sub materiil atau sampai dengan suku cadang terkecil apabila diperlukan.
      2) Pemberian nama baku ini dilakukan untuk memudahkan proses klasifikasi materiil.

   c. Pengklasifikasian/Pengelompokan.

      1) Mengelompokkan materiil menurut jenis dan fungsinya untuk menentukan grup dan kelas berdasarkan katalog yang terdapat dalam kodifikasi materiil sistem NSN.
      2) Pengklasifikasian materiil tersebut ditunjukkan dalam bentuk 4 digit angka paling depan dari 13 digit angka NSN, dengan ketentuan 2 digit pertama menunjukan grup dan 2 digit berikutnya menunjukan kelas.

PEMBELI	PENJUAL

d. Identifikasi Materiil

1) Memasukkan data karakteristik materiil/Spektek ke dalam format yang tertuang di dalam MRC (Minimum Requirement Characteristics).
2) Kode Negara 45 (NCB Indonesia) secara otomatis diberikan sebagai digit angka ke-5 dan ke-6 dari 13 digit angka NSN.
3) Setelah dimasukkan karakteristiknya, materiil yang diidentifikasikan tersebut akan diberikan nomor urut secara otomatis oleh aplikasi NCORE-NG dalam wujud 7 digit angka paling belakang dari 13 digit angka NSN.

e. Validasi

1) Melaksanakan validasi terhadap proses kadifikasi materiil yang telah dilakukan dengan aplikasi NCORE-NG, untuk menguji kebenaran pemberian terhadap :

   a) Nama baku materiil
   b) Grup dan kelas materiil
   c) Data karakteristik materiil/Spektek sesuai dengan data dukung yang ada.

2) Apabila diperlukan Tim Kodifikasi akan melaksanakan verifikasi data dukung dalam rangka validasi proses kodifikasi ke Pabrikan, dengan kegiatan sebagai berikut :

   a) Melaksanakan verifikasi dan konfirmasi terhadap data dukung dengan materiil secara visual di Pabrikan, apabila materiil belum dapat dikodifikasi.
   b) Melaksanakan konfirmasi terakhir terhadap materiil yang telah dapat kodifikasi sebelum penetapan NSN.

f. Penetapan/pemberian NSN

1) Menetapkan NSN terhadap materiil yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk 13 digit angka kode NSN.
   Contoh :
   1005 – 45 – 1234567

2) Menetapkan kode sementara (PSCN) terhadap materiil yang berasal dari luar negeri sampai dengan NSN diperoleh dari NCB negara pabrikan. Persyaratan minimal dalam penentuan PSCN :

   a) Nama Materiil.
   b) Part Number.
   c) Nama Pabrikan.
   d) Negara Pabrikan.
   Contoh :
   1005 – 45-PAA – 1234

PEMBELI	PENJUAL

C. PENGAKHIRAN

1. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kodifikasi oleh Tim Kodifikasi untuk disampaikan kepada PPK, PENJUAL dan Pengguna Barang.

2. Penerbitan Sertifikat Kodifikasi materiil hasil pengadaan untuk disampaikan kepada PENJUAL sebagai tanda bahwa materiil tersebut telah dikodifikasi.

3. Pengiriman Publikasi ke NSPA melalui Sistem NCS.

4. Penyerahan Publikasi Dokumen/Katalog NSN ke PENJUAL dan Pengguna Barang yang dilengkapi dengan rekapitulasi hasil NS

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "H"

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBELI	PENJUAL

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	KONTRAK EFEKTIF													
2.	PRODUKSI / P.0													
3.	KELAIKAN													
4.	KODIFIKASI													
5.	TKDN													
6.	RIKSA RIMA													

Jakarta, Januari 2025

Direktur,
PT. JADI SUKSES DIRGANTARA

Willianto

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "I"

NPWP PERUSAHAAN DAN NPWP DIREKTUR

PEMBELI	PENJUAL

NPWP PERUSAHAAN

NPWP DIREKTUR

PEMBELI	PENJUAL